



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812
Telepon (0414) 22333
Post e setda@kepuluanselayarkab.go.id

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 106/VIII/TAHUN 2024/SETDA**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 2/I/TAHUN 2024/SETDA
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk penyederhanaan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan melakukan pembagian tugas Pejabat Pembuat Komitmen lingkup Sekretariat Daerah, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 2/1/Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 2/1/Tahun 2024/SETDA tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022



- Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);



8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Surat Keputusan Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 215);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 2/I/Tahun 2024/Setda tentang Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.



- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yakni ketentuan pada diktum KESATU Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 2/I/Tahun 2024/Setda tentang Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka diktum KESATU Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 2/I/TAHUN 2024/SETDA tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 1 Agustus 2024

a.n. **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIS DAERAH,**



MESDIYONO

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Benteng;
6. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 106/VIII/TAHUN 2024/SETDA
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 2/I/TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | NAMA KEGIATAN | NAMA/NIP | JABATAN |
|-----------|--|---|--------------------------|
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | | |
| 1 | Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Drs. MESDIYONO, M. Ec. Dev./19740626 199311 1 002 | PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN |
| 2 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | s da | s da |
| 3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan/Dinas atau Kendaraan Dinas Pemeliharaan, Pajak dan | s da | s da |
| 4 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | s da | s da |
| 5 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | s da | s da |
| 6 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | TTTIEN RIANY, S.T.,M.T./19730104 200701 2 021 | PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN |
| 7 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | s da | s da |
| 8 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | s da | s da |
| 9 | Penyediaan Pakatan Dinas dan Atribut Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | s da | s da |
| 10 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | s da | s da |
| 11 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | s da | s da |
| 12 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | s da | s da |
| 13 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | s da | s da |
| II | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | | |
| 1 | A. BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL | | |
| 1 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | s da | s da |
| 2 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | s da | s da |
| 3 | Penyediaan Bahan/Material | s da | s da |
| 4 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | s da | s da |
| 5 | Penggandaan Meubel | s da | s da |
| 6 | Penggandaan Peralatan dan Mesin lainnya | s da | s da |
| 7 | Penggandaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | s da | s da |
| 8 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | s da | s da |
| 9 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | s da | s da |
| 10 | Pemeliharaan Mebel | s da | s da |



| NO | NAMA KEGIATAN | NAMA/NIP | JABATAN |
|--|--|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | sda | sda |
| 12 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | sda | sda |
| 13 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | sda | sda |
| 14 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | sda | sda |
| 15 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | sda | sda |
| 16 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | sda | sda |
| 17 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | sda | sda |
| B. BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | | | |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Drs. MESDIYONO, M. Ec. Dev./19740626 199311 1 002 | PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN |
| 2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | sda | sda |
| 3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | sda | sda |
| C. BAGIAN ORGANISASI | | | |
| 1 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | TITJEN RIANY, S.T.,M.T./19730104 200701 2 021 | PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN |
| 2 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | sda | sda |
| 3 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | sda | sda |
| 4 | Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | sda | sda |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | sda | sda |
| III ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | |
| A. BAGIAN PEMERINTAHAN | | | |
| 1 | Penataan Administrasi Pemerintahan | sda | sda |
| 2 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | sda | sda |
| 3 | Fasilitasi Otonomi Daerah | sda | sda |
| 4 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | sda | sda |
| B. BAGIAN HUKUM | | | |
| 1 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | sda | sda |
| 2 | Fasilitasi Bantuan Hukum | sda | sda |
| 3 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | sda | sda |
| C. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | |
| 1 | Pelaksanaan STQH Tingkat Provinsi | sda | sda |
| 2 | Pelaksanaan STQH Tingkat Kabupaten | sda | sda |
| 3 | Pelaksanaan Pemberangkatan Jamaah Haji | sda | sda |
| 4 | Pelaksanaan Pemulangan Jamaah Haji | sda | sda |



| NO | NAMA KEGIATAN | NAMA/NIP | JABATAN |
|--|---|----------|---------|
| 1 | | | |
| 5 | Pelaksanaan Zikir dan Doa Akhir Tahun | s da | s da |
| 6 | Pelaksanaan Lomba Festival Dai | s da | s da |
| 7 | Pelaksanaan Pengelolaan Baznas Kabupaten Kepulauan Selayar | s da | s da |
| 8 | Pelaksanaan Penyaluran Dana Hibah/Bansos | s da | s da |
| 9 | Pelaksanaan Verifikasi Proposal Rumah-rumah Ibadah | s da | s da |
| 10 | Pengelolaan dan Evaluasi Pendidik Tilawatil Qur'an, Kitab Kuning, Hafidz dan Imam Tetap Mesjid Agung | s da | s da |
| 11 | Peringatan Safari Ramadhan Kecamatan Daratan | s da | s da |
| 12 | Peringatan Hari-hari Besar Nasional | s da | s da |
| 13 | Peringatan Hari-hari Besar Islam | s da | s da |
| 14 | Penyaluran Insentif Guru BTQ | s da | s da |
| 15 | Pelaksanaan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS | s da | s da |
| 16 | Pengelolaan dan Evaluasi Pendidikan Al-Qur'an | s da | s da |
| 17 | Pemberian Santunan Veteran kepada Anggota Veteran dan Onderstand | s da | s da |
| IV ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | |
| A. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | | | |
| 1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | s da | s da |
| 2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | s da | s da |
| 3 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | s da | s da |
| 4 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | s da | s da |
| 5 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | s da | s da |
| 6 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah | s da | s da |
| B. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | | | |
| I. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | | | |
| Sub Kegiatan : | | | |
| 1 | Pembinaan Administrasi Kegiatan Pembangunan | s da | s da |
| 2 | Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan DAK | s da | s da |
| 3 | Monitoring dan Evaluasi Proyek/Kegiatan Pembangunan | s da | s da |
| 4 | Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | s da | s da |
| 5 | Penyusunan Dokumen Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pembangunan | s da | s da |
| 6 | Pembinaan dan Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran | s da | s da |



| NO | NAMA KEGIATAN | NAMA/NIP | JABATAN |
|----|--|----------|---------|
| 1 | C. BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA | 3 | 4 |
| 1 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | s d a | s d a |
| 2 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | s d a | s d a |
| 3 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | s d a | s d a |



a.n.
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIS DAERAH,
 Pemerintah Kabupaten
 Kepulauan Selayar
Seluruhnya dan ditandatangani secara digital
MESDIYONO



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
 Balai Sertifikasi Elektronik - Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
 Elektronik - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code